

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP GURU  
OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI JEPANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Sastra  
pada Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin**

**Oleh :**

**AKBAR IBRAHIM  
F911 08 280**

**PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**SKRIPSI****Tindak Kekerasan Terhadap Guru  
Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama Jepang**

Disusun dan diajukan oleh:

**AKBAR IBRAHIM**  
**Nomor Pokok: F91108280**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 19 Agustus 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui****Komisi Pembimbing**

Konsultan I

Konsultan II

**Margriet Moka Lappia, S.S, M.S**  
**NIP. 19560729 1983 032 002****Chadiyah Isfariani, S.S, M.Ed**  
**NIP. 19840319 2009 122 003**Dekan Fakultas Sastra  
Universitas HasanuddinKetua Jurusan Sastra Jepang  
Fakultas Sastra Unhas**Prof. Drs. Burhanuddin Arafah, M.Hum.,**  
**Ph.D**  
**NIP. 19650303 199002 1 001****Dra. Hj. Hamsinah Yasin, M. Hum**  
**NIP. 19541201 1987032 001**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA  
JURUSAN SASTRA JEPANG**

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor: 924/UN4.10.1//PP.35/2013 Makassar, tanggal 26 Februari 2013 dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, Juni 2013



**u.b Ketua Jurusan Sastra Jepang**

**Dra. Hj.Hamsinah Yasin, M.Hum**  
**Nip. 19541201 1987032001**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA**

Pada hari ini, Senin tanggal 19 Agustus 2013. Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**Tindak Kekerasan Terhadap Guru  
Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama Jepang**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Jurusan/Program Studi Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.



Makassar, 19 Agustus 2013

**Panitia Ujian Skripsi**

1. Margriet Moka Lappia, S.S, M.S : Ketua ( )
2. Chadijah Isfariani, S.S, M. Ed. : Sekretaris ( )
3. Imelda, S.S, M.Pd : Penguji I ( )
4. Nursidah, S.Pd., M.Pd : Penguji II ( )
5. Margriet Moka Lappia, S.S, M.S : Pembimbing I ( )
6. Chadijah Isfariani, S.S, M. Ed. : Pembimbing II ( )

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya. Semoga dipanjangkan umur zaman dalam keberkahan Allah SWT, dan semoga kita dirantingkan dalam pohon-pohon ketaqwaan dan dijadikan umat pembawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Teriring salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W, semoga rahma dan karunia Allah SWT, selalu menyertai rasyullah S.A.W dan keluarganyaa beserta para amirul mikminin. Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan bagi Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Hasnuddin dan pembelajar sejarah budaya Jepang. Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis memnuhi salah satu syarat ujian akhir guna meraih gelar Sarjana Sastra pada Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Dari hasil tempaan selama penulis belajar di bangku kuliah dan hasil penelitian, maka skripsi ini dengan judul **“Tindak Kekerasan Terhadap Guru oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama di Jepang”** ini dapat terselesaikan. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini belumlah sempurna, karena penulis masih banyak mempunyai kekurangan dan kelemahan. Serta pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis masih terbatas.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berupa materi,

pikiran, motivasi serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu, lewat kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap unsur yang telah membantu penulisan untuk sampai pada tahap ini, yaitu :

1. Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Salmah beserta kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan motivasi, bantuan spiritual dan material. Maafkan atas kenakalan-kenakalanku dan egoku selama ini.
2. Ibu Margriet Moka Lappia, S.S., M.S. dan Chadijah Isfariani, S.S., M.Ed. sensei atas kebebasan dan perhatian yang diberikan selama bimbingan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan dan staf pengajar di Jurusan Sastra Jepang yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menuntut ilmu. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Pak Suardi atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
4. Keluarga Hoshi Clan terkhusus buat Ihsan Bahrin, Bustanil Yasir, Heri Ilham, Muh. Farid Natsir, Djoko Riswanto, Sitti Mushawira, dan Nurrahma Ramadhani yang telah berbagi canda tawa selama ini. Maaf atas ego dan sifat kekanak-kanakanku selama ini.
5. Keluarga besar HIMASPA atas diskusi, opini, bantuan, kebersamaan dan keakrabanya.
6. Kawan-kawan di Fakultas Sastra terkhusus buat Nyoleng, Bitoks, Theo, Ippang, Khaer, Remon, Abot, dan Dian yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan kampus.



7. Satoko Konishi yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini dan mewarnai prosesku.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebut satu persatu, kata-kata bukanlah yang utama, maksudlah yang utama.

Semoga Allah SWT melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya kepada mereka, dan membalas segala kebajikan yang telah mereka perbuat. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,

Makassar, Agustus 2013



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah .....	3
1.3. Tujuan penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Metode Penelitian .....	4
1.5.1. Teknik Pengumpulan Data .....	6
1.5.2. Teknik Analisis Data .....	7
1.5.3. Metode Penulisan.....	7
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Sistem Pendidikan Jepang Pasca Perang Dunia II.....	9
2.1.2. Gambaran Guru Sekolah Menengah Pertama di Jepang Pasca Perang Dunia II.....	15
2.1.2.1. Peran Guru Sekolah Menengah Pertama di Jepang .....	20
2.1.2.2. Hubungan Guru dengan Siswa Sekolah Tingkat Menengah Pertama di Jepang .....	23
2.1.3. Sistem Hirarki di Jepang .....	24
2.1.3.1. Konsep <i>on</i> .....	27
2.1.3.2. Konsep <i>Gimu</i> dan <i>Giri</i> .....	29
2.1.4. Kekerasan dalam Masyarakat Jepang.....	33
2.2. Penelitian Relevan .....	37
2.3. Kerangka Konseptual.....	38
 <b>BAB III. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN PENDIDIKAN JEPANG PASCA GELEMBUNG EKONOMI</b>	
3.1. Kondisi Sosial Ekonomi Jepang Pasca Gelembung Ekonomi.....	39



3.2. Kondisi Sekolah Menengah Pertama Jepang Pasca Gelembung Ekonomi .....	42
3.2.1. Kasus-Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Guru oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama di Jepang .....	45

#### **BAB IV. ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP GURU OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI JEPANG**

4.1. Bentuk Kekerasan Terhadap Guru oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama di Jepang .....	51
4.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Guru oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama di Jepang.....	56
4.2.1. Kondisi Ekonomi Jepang Setelah Pecahnya Gelembung Ekonomi. ....	56
4.2.2. Melemahnya Nilai-nilai Tradisi Jepang.....	59
4.2.3. Berubahnya Kondisi Keluarga di Jepang .....	62
4.2.4. Perbedaan Nilai-nilai Antar Generasi dalam Masyarakat Jepang .....	66
4.2.5. Tekanan Ujian Masuk Sekolah di Jepang.....	73
4.2.6. Menurunnya Kualitas Guru di Jepang .....	74
4.2.7. Pengaruh Siaran Televisi di Jepang.....	78
4.3. Langkah-Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Guru di Jepang.....	79
4.3.1. Langkah-Langkah Antisipasi oleh Pihak Pemerintah dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Guru di Jepang.....	79
4.3.2. Langkah-Langkah Antisipasi oleh Pihak Sekolah dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Guru di Jepang.....	82

<b>BAB V. KESIMPULAN .....</b>	<b>85</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

### DAFTAR GAMBAR

1. Sistem Pendidikan Jepang.....	11
2. Kerangka Konseptual .....	38
3. Ratio Kehadiran di <i>juku</i> .....	43
4. Jumlah Kenakalan Remaja dan Tingkat Penangkapan Kenakalan Remaja per 500.000 Kasus .....	51
5. Jumlah Kasus Kekerasan di Sekolah Menengah Pertama .....	53
6. Jumlah kekerasan Terhadap Guru .....	54
7. Perbandingan Kecendrungan Tingkat Urbanisasi antara Jepang, Indonesia, dan Cina .....	59
8. Tingkat patisipasi angkatan kerja perempuan di Jepang.....	63
9. Peningkatan Persentase Pekerja Paruh Waktu Perempuan Berdasarkan Kelompok usia .....	64
10. Tren Jumlah Kelahiran dan Rata-rata Tingkat Kelahiran .....	65
11. Jumlah guru yang dikategorikan <i>shidouryokufukyouin</i> .....	76
12. Presentase sekolah yang memiliki guru dengan predikat <i>shidouryokufukyouin</i> .	77

### DAFTAR TABEL

1. Jumlah guru di Jepang .....	16
2. Tingkat Pengangguran di Jepang Berdasarkan Usia dalam Persentase .....	58
3. Presentase Komunikasi Ayah dengan Anak .....	61
4. Beberapa Atribut dari Keempat Generasi Jepang.....	71

## ABSTRAK

**Akbar Ibrahim. Tindakan Kekerasan Terhadap Guru oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama di Jepang. (Dibimbing oleh Margriet Moka Lappia dan Chadijah Isfariani).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk kekerasan terhadap guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Serta untuk mengetahui langkah-langkah antisipasi pemerintah dan pihak sekolah terhadap guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosial budaya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Dalam hal ini penulis mengambil contoh-contoh kasus nyata yang diperoleh melalui pustaka, statistik, surat kabar dan lain-lain. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian pustaka dan internet. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap mahasiswa dari Jepang yang melakukan praktek mengajar di Universitas Hasanuddin. Setelah data-data dikumpulkan, data-data tersebut di analisis dan dipaparkan dalam sebuah tulisan dengan teknik deskripsi analisis.

Dari penelitian ini dapat diungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap guru pada umumnya berupa tindakan spontanitas yang dilakukan oleh para siswa. Terdapat beberapa faktor menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap guru di Jepang yaitu kondisi ekonomi Jepang setelah pecahnya gelembung ekonomi, melemahnya nilai-nilai tradisi Jepang, berubahnya kondisi keluarga di Jepang, perbedaan nilai-nilai antar generasi dalam masyarakat Jepang, tekanan ujian masuk sekolah di Jepang, menurunnya kualitas guru di Jepang, dan pengaruh siaran pertelevisian Jepang. Untuk itu Pemerintah Jepang melalui Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEXT), mengeluarkan kebijakan berupa rencana reformasi pendidikan yang dikenal dengan *Rainbow Plan*. Pihak sekolah juga tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Langkah yang diambil oleh pihak sekolah berupa pemanggilan orang tua siswa dan pemberian sanksi berupa skorsing serta himbauan kepada orang tua siswa untuk tidak membiarkan anaknya keluar rumah selama masa skorsing. Selain itu pihak sekolah juga menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan pusat bimbingan anak di Jepang.

## 要旨

この論文のタイトルは、日本の中学生による教師に対する暴力行為。Margriet Moka Lappia 先生と Chadijah Isfariani 先生によるご指導を受けた。

この研究が目指す暴力行為の発生要因日本の中学生による教師に対する暴力の様々な形態を知っています。見越して、政府と日本の中学生による教師の手順を知っています。

この研究で著者によって使用される方法社会文化研究事例を質的アプローチを使用する方法です。この場合文学、統計、新聞から得られた実際のケース例しました。著者は図書館とインターネットの研究を通じてデータを収集しました。さらに、著者はまたハサヌディン大学で実習をした日本からの学生のインタビューを実施しました。データが収集されるデータは分析し、技術の分析の説明では、主催します。

この研究の表現できます対教師暴力一般に自発的な行為によって運ばれている、学生。バブル経済が崩壊後の日本経済のバーストは、日本、日本、日本、日本では、教師の質の低下に学校の入学試験の圧力で世代間の値の差で家族の変化、伝統的な日本の価値観の弱体化を放送の日本テレビの影響日本対教師暴力を引き起こしているいくつかの要因があります。日本政府（文部科学を虹の計画として知られている教育改革案の政策を発行します。学校も沈黙しなかったこの問題に直面しています。親および懸濁液の懸濁液の期間中に、家の子供たちを聞かせないように保護者へのアピールで制裁を呼び出すことの形で学校での手順。さらに、学校は日本の警察や児童相談所とも協力し。

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Banyak kasus kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang baik secara *verbal* maupun *non verbal*. Contohnya siswa kelas 3 di sebuah sekolah menengah pertama negeri di kota Sapporo diduga telah memasukan zat asing ke dalam makan siang guru laki-laki.<sup>1</sup> Hal ini tentu bertolak belakang dengan adat istiadat negara Jepang yang dikenal sebagai negara yang pada dasarnya mengatur dunia mereka dengan berpatokan pada hirarki. Jenis kelamin, usia, jabatan, ataupun status sosial menggambarkan hirarki yang telah dibentuk jauh sebelum mereka mulai membuka diri terhadap dunia luar.

Dalam menjalankan hirarkinya, bangsa Jepang mempunyai aturan-aturan yang ketat yang telah mengakar dalam budaya bangsa Jepang. Seperti dalam bahasa yang mereka gunakan, bagaimana mereka menggunakan *sonkeigo* dalam menghormati lawan bicara ataupun *kenjougo* untuk merendahkan dirinya. Atau dalam mereka memberi hormat, sejak kecil mereka sudah diajarkan bagaimana cara memberi hormat dengan cara membungkukan badan, kepada siapa saja mereka harus membungkukkan badan bahkan seberapa rendah mereka harus membungkukkan badannya tergantung siapa yang mereka hormati.

Kasus kekerasan terhadap guru tidak hanya terjadi di Jepang, kasus seperti ini juga terjadi di Indonesia dan negara-negara lainnya. Tetapi angka kekerasan

---

<sup>1</sup> *Asahi Shinbun*, *Kyouyu no kyushoku ni ibutsu ga konnyuuka sapporo no shiritsuchuu*, terbit tanggal 22 Mei 2006, hlm. 23.

terhadap guru di Jepang cukup memprihatinkan bagi dunia pendidikan Jepang. Pada tahun 1983 kasus ini mencapai angka kurang lebih 900 peristiwa dengan korban mencapai angka 2000 seperti yang dilaporkan oleh polisi Jepang.<sup>2</sup> Kasus kekerasan terhadap guru ini merupakan kasus yang ditangani oleh pihak polisi Jepang yang memberi indikasi sekolah-sekolah di Jepang sudah tidak mampu menangani kasus seperti ini atau dengan kata lain tindak kekerasan ini merupakan tindak kriminal.

Selain jumlah kekerasan yang terjadi cukup memprihatinkan, kekerasan terhadap guru ini juga sangat bertolak belakang dengan kebudayaan Jepang. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pada dasarnya Jepang mengatur dunia mereka berdasarkan hirarki. Sistem ini tentunya juga berlaku terhadap guru dan siswa di sekolah. Guru berada ditingkatan atas dan murid berada di bawahnya. Guru juga merupakan sebuah profesi yang sangat dihormati. Itu terlihat dari cara orang Jepang menyebut guru di Jepang dengan *sensei*<sup>3</sup>. Hal ini tentu merefleksikan peranan guru sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat Jepang.

Apakah kasus ini disebabkan oleh faktor ekonomi, pergeseran budaya, atau menurunnya mutu pendidikan Jepang?. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak

---

<sup>2</sup> Mitsuru Taki, *Basic Knowledge on Bullying Issues*, A paper presented at the International Conference on School-bullying Prevention in Taiwan 2011 August 20-21 at National Taiwan University by Humanistic Education Foundation, [pdf], ([www.nier.go.jp/a000110/Draft\\_in\\_Taiwan.pdf](http://www.nier.go.jp/a000110/Draft_in_Taiwan.pdf), diakses 4 Maret 2013), 2011, hlm. 1.

<sup>3</sup>Sensei merupakan istilah kehormatan yang lebih tinggi yang dipergunakan murid untuk menyebutkan guru, dan juga digunakan untuk para profesional oleh masyarakat umum (Chie Nakane, 1982: 32).



kekerasan yang dialami oleh guru di Jepang yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah di Jepang, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Tindak Kekerasan terhadap Guru oleh Siswa Sekolah Tingkat Menengah Pertama di Jepang*”.

## **1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah agar penulisan karya ilmiah ini tidak melenceng dari judul skripsi tersebut terutama dalam mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap guru di Jepang. Ada pun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak kekerasan terjadi terhadap guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang?
2. Mengapa terjadi tindak kekerasan terhadap guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang?
3. Bagaimana langkah antisipasi pemerintah dan pihak sekolah terhadap tindak kekerasan terhadap guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang?

Untuk itu penulis membatasi ruang lingkup masalah dengan memberi batasan waktu yaitu tindakan kekerasan terhadap guru pasca pecahnya gelembung ekonomi Jepang (1990-2012) yang terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama (*chuugakko*) di kota-kota besar Jepang.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berbagai bentuk kekerasan terhadap guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang,
2. Untuk mengungkap faktor-faktor penyebab terjadi tindak kekerasan guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang,
3. Untuk mengetahui langkah-langkah antisipasi pemerintah dan pihak sekolah terhadap guru oleh siswa sekolah menengah pertama di Jepang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini selain sebagai tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Sastra di Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Serta memperoleh gambaran tindak kekerasan yang terjadi terhadap guru di Jepang agar dapat menjadi masukan bagi dunia pendidikan di Indonesia, sehingga tindak kekerasan terhadap guru tidak terjadi di Indonesia. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan serupa.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian yang berjudul *Tindak Kekerasan terhadap Guru oleh Siswa Sekolah Tingkat Menengah Pertama di Jepang* adalah metode penelitian sosial budaya. Objek penelitian sosial budaya

adalah manusia dan fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial budaya. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap guru oleh para murid di Jepang. Untuk menjawab fokus penelitian tersebut dibutuhkan subfokus yang mempertanyakan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap guru oleh para murid di Jepang. Fokus penelitian yang demikian, menurut Yin lebih bersifat eksplanatori dan lebih mengarah ke penggunaan strategi studi kasus.<sup>4</sup> Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Lebih jauh menurut Bogdan dan Taylor, menyatakan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik dan utuh.<sup>5</sup> Penelitian kualitatif terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya yaitu studi kasus. Penulis memilih menggunakan model studi kasus, karena menganggap kasus kekerasan terhadap guru oleh murid di Jepang termasuk kedalam kasus *retrospektif*. Kasus *retrospektif* sendiri bersifat kuratif yang memungkinkan adanya tindak lanjut penyembuhan.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis mengambil contoh-contoh kasus nyata yang diperoleh melalui pustaka, statistik, surat kabar dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, Newbury Park, CA: Sage, 1984, hlm. 18.

<sup>5</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

### 1.5.1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui penelitian pustaka dan internet. Pada prosesnya, penulis melakukan penelitian pustaka dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin. Pada perpustakaan-perpustakaan tersebut penulis memperoleh beberapa data yang relevan berupa buku-buku seperti *Pedang Samurai dan Bunga Seruni (Pola-pola Kebudayaan Jepang)* karya Ruth Benedict, *Masyarakat Jepang* karya Chie Nakane dan *Teaching and Learning in Japan* karya Thomas P. Rohlen dan Gerald K. LeTendre . Kemudian melalui penelitian internet penulis dapat memperoleh data berupa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maupun dokumen-dokumen mengenai berita-berita kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh murid di Jepang baik dalam bentuk *pdf*, *html*, maupun berupa gambar yang didapat dari surat kabar *online*, situs Kementerian Pendidikan Jepang ataupun melalui *search engine* seperti *google search*. Terutama untuk kasus-kasus tindak kekerasan penulis mendapatkannya melalui beberapa surat kabar *online* Jepang.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap mahasiswa dari Jepang yang melakukan praktek mengajar di Universitas Hasanuddin ataupun mahasiswa Jepang yang pernah melakukan praktek mengajar di Universitas Hasanuddin. Dari

mereka penulis mendapat berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini.

### **1.5.2. Teknik Analisis Data**

Analisis data berupa proses pengkajian dokumen yang telah terkumpul. Analisis bersifat terbuka, *open ended*, dan induktif, atau dengan kata lain analisis bersifat longgar, tidak kaku, dan tidak statis. Analisis boleh berubah, kemudian mengalami perbaikan, dan pengembangan sejalan dengan data yang masuk. Hasil analisis juga tidak direncanakan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, setelah mengumpulkan data-data yang cukup, penulis kemudian melakukan analisis data terhadap data-data yang ada, membandingkan satu data dengan data yang lainnya sesuai dasar-dasar teori sosial budaya yang absah agar dapat memperoleh informasi yang tepat dan jelas mengenai persoalan dalam penelitian ini. Selanjutnya menarik kesimpulan atas semua data yang telah di analisis dan merangkumnya menjadi suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

### **1.5.3. Metode Penulisan**

Adapun metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan dan menuliskan data sebagaimana adanya dan menjelaskan faktor-faktor kausalitasnya. Penelitian deskriptif untuk

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 215.

mengungkap fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Setelah data-data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah memahami, mendeskripsikan dan menganalisa data-data tersebut. Kemudian menyajikan data-data yang telah dianalisis secara sistemik, yaitu dimulai dengan memberikan gambaran yang jelas tentang hirarki masyarakat Jepang, khususnya dengan menyoroti status sosial guru dalam masyarakat Jepang, mengungkapkan faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap guru beserta usaha-usaha pelaku melakukan masalah tersebut. Sehingga lebih mudah dipahami agar dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban pada tujuan penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Sistem Pendidikan Jepang Pasca Perang Dunia II**

Sebagai bangsa yang maju di dunia, Jepang tentu memiliki pondasi yang cukup kuat baik dari segi budaya maupun pendidikan dalam membangun negaranya. Khusus dalam pendidikan, Jepang tentu mempunyai kualitas di atas negara lain, salah satu contoh indikasi kualitas pendidikan Jepang yaitu Jepang berada di peringkat kedua dalam *EDI ( Education for All Development Indeks)* yang dilansir oleh UNESCO pada tahun 2009.<sup>8</sup> Dengan tolak ukur antara lain pelaksanaan pendidikan dasar, tingkat melek huruf di atas 15 tahun, rasio kasar tingkat melek huruf usia dewasa, kualitas pendidikan. Tentu hasil ini tidak diraih dengan mudah.

Terjadi pasang surut dalam perkembangan pendidikan Jepang. Secara keseluruhan Jepang mengalami tiga kali reformasi pendidikan. Yang pertama dilaksanakan pada waktu terjadinya Restorasi Meiji, selanjutnya pasca kekalahan perang dunia II dan yang terakhir di awal milineum yaitu tahun 2000. Secara garis besar reformasi pendidikan Jepang pasca Restorasi Meiji membuat pendidikan Jepang lebih berstruktur dibandingkan masa Tokugawa, pendidikanpun lebih merata keseluruh lapisan masyarakat walaupun pendidikan tingkat atas sangat

---

<sup>8</sup> UNESCO, *Education for All Global Monitoring Report 2009*, [PDF], ([http://www.unesco.org/education/gmr2009/press/efagmr2009\\_Annex1\\_EDI.pdf](http://www.unesco.org/education/gmr2009/press/efagmr2009_Annex1_EDI.pdf), diakses 19 Marer 2013), hlm. 248.

menyulitkan bagi kaum miskin dari sisi ekonomi. Fasilitas pendidikan berkembang sangat pesat mulai dari didirikannya berbagai sekolah sampai buku-buku yang diterjemahkan kedalam bahasa Jepang.

Reformasi pendidikan yang kedua yaitu saat pasca Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia II. Pemerintah Jepang di bawah pengawasan SCAP menghasilkan Undang-undang Pendidikan yang baru yang disahkan pada 31 Maret 1947 dan mulai diterapkan sehari setelah disahkan. Adapun tujuan Undang-undang Dasar Pendidikan yang baru tersebut terbagi menjadi empat, yaitu:

- (1) Gagasan pendidikan dalam mencari “pencapaian dari pembentukan karakter,
- (2) Kesempatan yang sama dalam mengancam pendidikan dan kesetaraan jenis kelamin,
- (3) Sistem sekolah yang demokratis dan satu jalur,
- (4) Wajib belajar 9 tahun yang digratiskan.<sup>9</sup>

Gagasan pendidikan dalam mencari “pencapaian dari pembentukan karakter yaitu membentuk pendidikan Jepang yang terlepas dari sifat kemiliteran yang diwarisi masa sebelumnya”. Tujuan selanjutnya yaitu membuat pendidikan yang merata terhadap semua kalangan masyarakat Jepang baik dari golongan kaya atau miskin maupun dari jenis kelamin. Sehingga tidak ada lagi deskriminasi yang

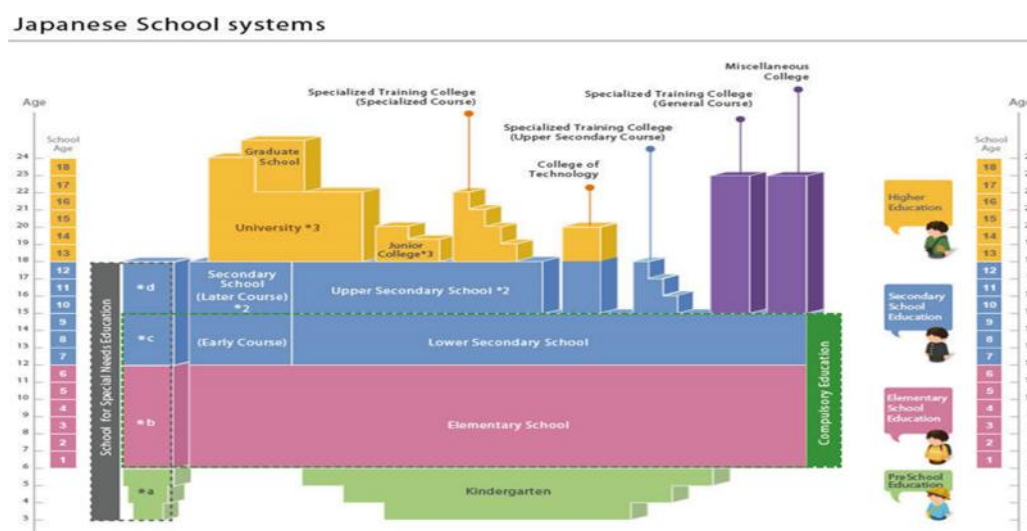
---

<sup>9</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), *An Introduction Postwar Educational Reform In Retrospect* ([http://www.mext.go.jp/b\\_menu/hakusho/html/hpac200101/hpac200101\\_2\\_005.html](http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpac200101/hpac200101_2_005.html), diakses 17 Maret 2013).

terjadi dalam pendidikan Jepang. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah Jepang bertujuan melaksanakan wajib belajar 9 tahun yang digratiskan. Walaupun pada fase-fase awal pemerintah Jepang kesulitan melaksanakan hal tersebut diakibatkan ekonomi Jepang yang anjlok pasca perang dan kondisi Jepang yang hancur dibombardir oleh pasukan sekutu.

Sistem sekolah Jepang juga mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-undang pendidikan tersebut yaitu mengikuti sistem Amerika Serikat (6-3-3-4). Sistem yang sama dengan sistem pendidikan di Indonesia ini masih berlaku hingga saat ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1: Sistem pendidikan Jepang<sup>10</sup>



Dari gambar tersebut dapat dilihat pendidikan Jepang dibagi menjadi empat tingkatan yaitu, pendidikan pra sekolah (usia 3-6 tahun), pendidikan dasar (usia 6-12 tahun), pendidikan menengah (usia 12-18 tahun) dan pendidikan atas (usia 18-24 tahun). Pendidikan menengah sendiri terbagi atas sekolah menengah

<sup>10</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), *Principles Guide Japan's Educational System*, (<http://www.mext.go.jp/english/introduction/1303952.htm> diakses 28 Februari 2013)

pertama dan sekolah menengah atas. Pendidikan tinggi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu universitas program sarjana (S1) yang masa waktunya 4 tahun (kecuali beberapa jurusan yang sampai 6 tahun seperti kedokteran dan farmasi), program pasca sarjana (S2) yang masa waktunya antara 2-3 tahun, dan sekolah tinggi keahlian (D2-D3). Untuk wajib belajar sama dengan wajib belajar yang berlaku di Indonesia yaitu 9 tahun yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Berbeda dengan sistem sekolah Jepang yang hanya mengalami satu kali perubahan sejak reformasi pendidikan pasca perang dunia II, panduan kurikulum Jepang mengalami beberapa kali perubahan. Panduan kurikulum di sekolah Jepang disebut *Gakushu Shidoyoryo* (GS). Panduan kurikulum ini pada awalnya mengalami perubahan tiap 5 tahun tapi kemudian berubah menjadi 10 tahun sekali kecuali pada tahun 1971, 1980, dan 1992. Panduan kurikulum ini hanya berupa acuan untuk tiap sekolah menyusun kurikulumnya masing-masing. Salah satu kurikulum yang menyita perhatian masyarakat yaitu *yutori kyoiku* yang diperkenalkan pada tahun 1980. *Yutori Kyoiku* berarti pendidikan yang memberikan ruang untuk tumbuh pada anak.<sup>11</sup> Dalam artian kurikulum ini memberi keluluasan ruang dan waktu kepada anak untuk belajar. Sehingga belajar tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Waktu belajar disekolah dikurangi dari 6 hari seminggu menjadi 5 hari seminggu yang berlangsung dari hari senin sampai jumat. Tujuannya untuk memberi kesempatan belajar terhadap siswa di luar sekolah pada akhir pekan. Sehingga para siswa tidak menjadi stress akan kondisinya

---

<sup>11</sup> Ogi Naoki, "Japanese Education Today: Time To Move On" JAPANECHOWEB no.2 Agustus-September 2010, hlm. 1.

pelajaran yang sangat sarat akan materi di sekolah seperti yang terjadi sebelum *yutori kyouiku* berlaku.

Akan tetapi semenjak kurikulum ini berlaku indeks prestasi para siswa mengalami penurunan. Konsep *yutori kyouiku* disalahartikan dalam penerapannya. Seperti para siswa tidak mengaplikasikan waktunya untuk belajar di luar sekolah pada akhir sekolah. Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktunya untuk bermain game. Selain itu konsep menyebabkan minat belajar yang menurun akibat dari kedisiplinan yang diterapkan dahulu ikut menurun pula. Kenakalan-kenakalan remaja pun mulai mencuat pada saat itu, walaupun bukan sepenuhnya disebabkan oleh konsep *yutori kyouiku*.

Berkaitan dengan masalah di atas, arah reformasi pendidikan yang ketiga di Jepang yang tertuang dalam *Rainbow Plan* adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemampuan dasar akademis siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada tiga pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri dari 20 anak per kelas, pemanfaatan IT dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional.
- b. Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran moral di sekolah.

- c. Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, di antaranya dengan kegiatan ekstra kurikuler olah raga, seni, dan sosial lainnya.
- d. Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Tujuan ini dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri, dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan *school councilor*, komite sekolah (*gakkouhyougiseido*) yang beranggotakan orang tua dan masyarakat, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat.
- e. Melatih guru untuk menjadi tenaga profesional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan etos kerja guru, dan pelatihan bagi guru yang kurang cakap di bidangnya.
- f. Pengembangan universitas bertaraf internasional
- g. Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui reformasi konstitusi pendidikan .<sup>12</sup>

Salah satu hal yang menarik dari *Rainbow Plan*, yaitu pengembangan kelas kecil terdiri dari 20 siswa perkelas. Kelas kecil diharapkan dapat mengefisienkan proses belajar mengajar di kelas. Bandingkan dengan Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 40 siswa perkelas. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu metode

---

<sup>12</sup> Murni Ramli, “kebijakan evaluasi guru di jepang “ *EDUCATIONIST*, Bandung, UPI & Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia Vol. II no. 2 Juli 2008, 2008, hlm. 115.



yang tepat untuk menekan kasus kriminal di kalangan siswa.<sup>13</sup> Untuk itu, fasilitas sekolah di Jepang perlu ditambah baik dari jumlah kelas sampai dengan jumlah guru.

### **2.1.2. Gambaran Guru Sekolah Menengah Pertama di Jepang Pasca Perang Dunia II**

Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan suatu bangsa. Guru merupakan ujung tombak dunia pendidikan di sekolah karena mempunyai peranan untuk menciptakan SDM yang dapat berkompetitif dengan generasi bangsa lain dalam suatu masyarakat dunia. Hal itulah yang membuat Jepang sampai harus mengimpor guru dari negara barat ketika melaksanakan restorasi Meiji setelah melaksakan politik isolasi selama kurang lebih 2,5 abad demi dapat bersaing dengan dunia barat.

Dalam bahasa Jepang terdapat beberapa kata yang mengungkapkan arti guru, tetapi yang paling umum digunakan yaitu *kyoushi*, *shidosha* dan *sensei*. Kata *sensei* merupakan istilah kehormatan yang lebih tinggi untuk menyebut guru<sup>14</sup>, karena guru merupakan profesi yang sangat dihormati di Jepang dan pendapatan mereka mencerminkan status itu<sup>15</sup>. Guru yang baru mengajar di Jepang akan mendapatkan pendapatan sebesar 156.500 yen perbulan yang akan mengalami

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 155.

<sup>14</sup> Chie Nakane, op.cit., hlm. 50.

<sup>15</sup> Shin Ying Lee dkk, " *Teacher and Teaching: Elementary School in Japan and United States*" *Teaching and Learning in Japan*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, hlm. 164.

kenaikan pendapatan rata-rata 15.000 yen pertahun. Angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya.

Dari pendapatan dan status yang disandang oleh guru di Jepang, terjadi peningkatan jumlah guru yang mengajar di Jepang dari tahun ke tahun. Peningkatan

Tabel 2.1: Jumlah guru di Jepang<sup>16</sup>

FY	Total	Kindergarten	Elementary School	Lower secondary school	Upper secondary school
1950	610,411	8,028	305,520	182,008	82,932
1960	823,303	31,330	360,660	205,988	131,719
1970	1,016,925	66,579	367,941	224,546	202,440
1980	1,267,044	100,958	467,953	251,279	243,592
1990	1,361,434	100,932	444,218	286,065	286,006
1995	1,353,209	102,992	430,958	271,020	281,117
2000	1,320,810	106,067	407,598	257,605	269,027
2005	1,322,460	110,393	416,833	248,694	251,408
2006	1,323,418	110,807	417,858	248,280	247,804
2007	1,326,480	111,239	418,246	249,645	243,953
2008	1,327,655	111,223	419,309	249,509	241,226
2009	1,329,561	110,692	419,518	250,771	239,342
(male)	683,089	7,205	156,049	146,095	170,144
(female)	646,472	103,487	263,469	104,676	69,198

Dari tabel di atas terjadi peningkatan yang stabil terhadap jumlah guru jika dilihat secara keseluruhan. Namun untuk jumlah guru yang mengajar di pendidikan tingkat menengah yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terjadi pasang surut terhadap jumlah guru yang mengajar dari

<sup>16</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), *Statistics*, diakses melalui <http://www.mext.go.jp/english/statistics/index.htm> pada tanggal 21 Januari 2013.

tahun ke tahun. Jumlah guru yang mengajar di sekolah menengah di tahun 1950 sebesar 182.008 orang dengan mengalami kenaikan rata-rata  $\pm$  23.000 orang tiap 10 tahun sampai pada tahun 1990 yang mencapai angka 286.065 orang. Angka ini kemudian mengalami penurunan secara perlahan sampai menyentuh angka 248.280 orang pada tahun 2006 dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yang di tahun 2009 mencapai 250.771 orang. Hal yang tidak jauh berbeda dialami oleh jumlah guru di sekolah atas, pada tahun 1950 jumlah guru hanya sebesar 82.932 orang yang mengalami kenaikan hingga mencapai 286.006 orang pada tahun 1990 dan turun menjadi 239.342 orang di tahun 2009.

Sebelum perang dunia II, guru dihasilkan melalui sekolah guru yang dibangun sejak era Meiji. Sekolah guru ini kemudian disatukan dalam sistem universitas. Universitas Negeri yang didirikan di masing-masing prefektur memiliki fakultas pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan guru sekolah dasar dan sekolah menengah untuk kebutuhan guru di prefektur mereka. Selain itu guru juga dihasilkan oleh akademi guru yang setingkat universitas. Salah satu contoh akademi guru yaitu Kobe Shoin yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin khususnya Jurusan Sastra Jepang dengan mengirim dua orang mahasiswa untuk melakukan praktek mengajar.

Untuk mengajar di Jepang dibutuhkan lisensi mengajar. Lisensi mengajar di Jepang terbagi atas tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ordinary Licence* (lisensi biasa)

Lisensi ini berlaku selama 10 tahun yang terbagi atas tiga jenis yaitu, *specialized certificate (master's course completed or equivalent)*, *primary license (college graduate or equivalent)* dan *secondary license (junior college or equivalent)*. Untuk mendapatkan lisensi ini harus mengikuti pelatihan guru di sebuah universitas. Dalam pelatihan ini terdapat dua hal yang dilatih yaitu pelatihan dasar mata pelajaran dan praktek kemampuan mengajar.

b. *Special License*

Jangka waktu berlakunya lisensi ini sama dengan *ordinary license* yaitu 10 tahun. Berbeda dengan *ordinary license* yang fundamental utamanya berupa pelatihan di sebuah universitas, lisensi ini diberikan kepada masyarakat yang telah lulus ujian personal pendidikan yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Prefektur untuk memberi kesempatan kepada individu yang memiliki pengalaman atau kemampuan tapi tidak memiliki lisensi guru (*Special license* diberikan untuk setiap sekolah dan mata pelajaran). Adapun syarat dari lisensi ini yaitu, harus memiliki pengetahuan yang lebih dan pengalaman mengenai mata pelajaran yang akan diajarkan dan harus bersemangat dan mempunyai pengetahuan luas untuk memiliki pengaruh sosial terhadap yang lain dan melakukan tugas seorang guru.

c. *Temporary License*

Lisensi yang diberikan kepada asisten guru hanya ketika setiap individu dengan lisensi biasa tidak dapat diterima. Lisensi ini hanya berlaku selama 3 tahun. Adapun syarat dari lisensi ini yaitu harus lulus ujian personal pendidikan (kepribadian, kemampuan praktis, dan kebugaran fisik) yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Prefektur.<sup>17</sup>

Untuk *Ordinary License* merupakan lisensi yang diberikan oleh Universitas Negeri tiap prefektur yang memiliki fakultas pendidikan dan akademi guru yang sama dengan IKIP (sebelum berganti menjadi universitas negeri untuk masing-masing daerah) di Indonesia yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk menghasilkan guru. Sedangkan untuk *Special License* diberikan kepada lulusan Universitas pada umumnya yang jika dibandingkan dengan Indonesia hampir sama dengan sertifikasi Akta IV. Kemudian untuk *Temporary License* tidak jauh berbeda dengan *Special License*, yang membedakan hanya jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan *Special License*.

Dalam mempersiapkan guru di Jepang, perguruan tinggi memberikan pelatihan terutama di bidang substantif seperti bahasa, seni, matematika dan ilmu pengetahuan.<sup>18</sup> Hal ini memberikan tambahan ilmu di luar bidang ilmu yang dikuasainya. Para calon gurupun diharapkan dapat mengikuti kelas pelatihan tersebut, tapi hal ini tidak dipaksakan untuk setiap calon guru. Selain itu dalam pelatihan tersebut terdapat pelatihan mengenai psikologi mengajar dalam

---

<sup>17</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, *Teacher training/licensing System*, Tokyo, Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, 2008, hal 2-3

<sup>18</sup> Shin Ying Lee, op.cit, hlm. 165.

menghadapi siswa di kelas.<sup>19</sup> Dengan tujuan dapat memahami psikologis siswa yang diajarnya. Kemudian dalam beberapa minggu mereka melakukan praktek mengajar dan pelatihan dalam menghadapi siswa di sekolah. Guru di Jepang tidak mendapatkan ketrampilan mengajar dalam kelas perguruan tinggi melainkan dalam kegiatan belajar mengajar yang nyata.<sup>20</sup> Hal ini memberikan pengalaman terhadap calon guru dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pengajaran yang sebenarnya. Selain itu, masyarakat Jepang memandang mengajar merupakan sebuah kerajinan yang akan menjadi sempurna dengan praktek dan saling berbagi informasi antara guru dengan guru lainnya.

#### **2.1.2.1. Peran Guru Sekolah Menengah Pertama di Jepang**

Guru di Jepang mempunyai banyak peran dan tanggung jawab, jauh melampaui gagasan kita mengenai mengajar itu sendiri.<sup>21</sup> Mereka tidak hanya datang ke sekolah hanya untuk memberikan pelajaran, banyak hal yang dilakukan guru selain mengajar seperti memberikan konseling kepada siswanya. Selain itu guru di Jepang sering melakukan komunikasi kepada orang tua siswa. Komunikasi ini bertujuan memberikan informasi akademik siswa di sekolah, acara yang dilaksanakan sekolah, ataupun untuk memantau kehidupan siswa di rumah.

Guru mempunyai tiga tugas utama dalam membimbing para siswanya yaitu, *gakushu shidou* (membimbing pelajaran), *seito shidou* (membimbing siswa), dan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan mahasiswa kobe shoin

<sup>20</sup> Shin Ying Lee, op. cit, hlm. 165.

<sup>21</sup> Gerald K. Letendre, "*Shindou: The Concept of Guidance*" *Teaching and Learning in Japan*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, hlm. 283.



*shinrou shidou* (membimbing karir/bakat).<sup>22</sup> Tugas membimbing pembelajaran yaitu guru berperan sebagai tenaga pengajar yang mengajarkan mata pelajaran bagi siswa. Selanjutnya membimbing siswa yaitu guru berperan sebagai pembina siswa atau orang tua siswa di sekolah yang bertujuan untuk membina siswa kebaikan-kebaikan sesuai nilai dan norma yang berlaku di Jepang. Sedangkan untuk membimbing karir atau bakat yaitu kemampuan seorang guru dalam mengarahkan siswa berdasarkan keinginannya, bakat dan kemampuan akademiknya. Selain ketiga tugas tugas tersebut, guru juga mempunyai tugas dalam membimbing kebiasaan sehari-hari siswa (*seikatsu shidou*).<sup>23</sup> *Seikatsu shidou* juga sering disebut sebagai bimbingan kehidupan.

Selain tugas dalam membimbing siswa, guru di Jepang juga mempunyai tugas dalam memajemen sekolah (*gakko keie*).<sup>24</sup> Tugas ini lebih menekankan dalam kemampuan guru memajemen admistarsi sekolah, seperti tugas seorang guru dalam menyusun kurikulum sekolah. Selain itu tugas ini menumbuhkan kemampuan bekerja sama dengan guru lainnya dalam memahami dan berusaha mencapai tujuan sekolah.

Guru juga mempunyai peran sosial dan budaya dalam masyarakat Jepang seperti yang dijelaskan oleh Thomas P. Rohlen dan Gerarld Letendre sebagai berikut:

“Teacher” (*sensei/shidosha*) is a social role in school, companies, and artistic pursuits, part of a set of fundamental realationship that include emotional and social obligations no conveyed by equivalen English term; in Japanese,

---

<sup>22</sup> Yasuko Minoura, “*The Development of Ethnographic Studies of Schooling in Japan*” *Anthropologies of Education: a global guide to ethnographic studies of learning and schooling*, New York, Berghahn Books, 2011, hlm. 214.

<sup>23</sup> Murni Ramli, Op.cit, hlm. 118.

<sup>24</sup> Murni Ramli, Op.cit, Hal 118.

“teacher” is a symbol that triggers a range of association and emotions for virtually all members of society. Whether in a monastery or a factory, those Japanese designate as *sensei/shidosha* are understood and judged within a framework of culture-specific expectations.<sup>25</sup>

Terjemahan:

Guru (*sensei/shidosha*) merupakan sebuah peran sosial di sekolah, perusahaan, dan pencarian pengetahuan yang artistik, bagian dari serangkaian hubungan fundamental yang mencakup emosional dan kewajiban sosial yang tidak bisa digambarkan dalam bentuk bahasa Inggris; dalam bahasa Jepang, guru merupakan sebuah simbol yang memicu berbagai asosiasi dan emosi untuk hampir semua masyarakat. Apapun itu baik di biara maupun di pabrik, orang Jepang yang menjadi *sensei/shidosha* dimengerti dan dinilai sebagai kerangka harapan budaya.

Guru mempunyai peran sosial yang merupakan bagian dari serangkaian hubungan fundamental yang mencakup hubungan emosional dan kewajiban sosial yang terjadi di sekolah, sehingga guru dijadikan panutan untuk memicu berbagai hubungan dan emosi untuk hampir semua masyarakat Jepang. Guru juga dianggap sebagai kerangka harapan budaya yang berarti guru mempunyai peran untuk mempertahankan budaya Jepang yang sudah mulai terkikis oleh modernisasi dan pengaruh dunia barat. Sehingga guru di Jepang tidak hanya mengemban tugas sebagai pembimbing akademik para siswa saja, mereka mempunyai peran moral untuk pengembangan karakter dengan menanamkan nilai-nilai fundamental Jepang pada sikap dan kebiasaan hidup pada siswa.

#### **2.1.2.2. Hubungan Guru dengan Siswa Sekolah Menengah Pertama di Jepang**

Hubungan guru dengan siswa sekolah tingkat menengah di Jepang merupakan ikatan vertikal yang menekankan susunan hirarki atas bawah.

---

<sup>25</sup> Thomas P. Rohlen dan Gerald Letendre, “Introduction: Japanese Theories of Learning” *Teaching and Learning in Japan*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, hlm. 5.

Hubungan yang sama dengan konsep *oyabun-kobun* dalam sistem keluarga tradisional Jepang (*ie*). Guru tidak hanya memegang peran sebagai seorang tenaga pengajar untuk para siswanya, guru juga mempunyai peran sebagai seorang pembimbing. Guru yang memiliki peran pendidik moral untuk pengembangan karakter dengan menanamkan nilai-nilai fundamental Jepang pada sikap dan kebiasaan hidup pada siswa yang diajarnya.

Dalam kebanyakan sekolah menengah di Jepang, siswa menulis buku harian, menulis aktivitas sehari-hari mereka atau masalah yang mengganggu mereka. Buku harian tersebut kemudian di berikan kepada guru mereka (wali kelas) setiap minggunya kemudian guru tersebut akan mengembalikannya dengan komentar ataupun saran-saran mengenai isi buku harian tersebut.<sup>26</sup> Dari buku harian inilah guru membangun kekuatan emosional yang kuat terhadap siswanya. Sehingga siswapun tak segan meminta saran-saran untuk hal-hal yang sifatnya pribadi.

Buku harian ini kemudian merupakan sebuah alat yang penting dalam apa yang guru sebagai bimbingan kehidupan (*seikatsu shidou*). Bimbingan Kehidupan (*seikatsu shidou*) merupakan sebuah bentuk informal yang digunakan oleh guru untuk menunjukkan filosofi dasar yang siswa perlu mempelajari mengenai gaya hidup yang benar, sopan santun, tata krama, tanggung jawab dan lain-lain.<sup>27</sup> Inilah aplikasi nyata guru di Jepang yang menjadi orang tua bagi siswanya di sekolah. Guru di Jepang tidak hanya berperan sebagai pembimbing akademik siswa tapi

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 276.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 277.

juga memiliki peran sebagai pembimbing moral dan psikologi siswa. Guru sama baiknya dengan orang tua, guru antusias dan berdedikasi untuk kesuksesan siswanya. Di Indonesia guru juga disebut sebagai orang tua di sekolah tetapi banyak guru di Indonesia hanya berprofesi sebagai seorang tenaga pengajar saja.

### 2.1.3. Sistem Hirarki di Jepang

Kata hirarki berasal dari kata Yunani yaitu *hierarches* yang berarti pemimpin agama atau imam agung. Tetapi dalam ilmu sosial, hirarki diartikan suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas," "bawah," atau "pada tingkat yang sama" dengan yang lainnya. Secara abstrak hirarki dapat diartikan suatu hal yang disusun secara bertingkat-tingkat.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pada dasarnya masyarakat Jepang mengatur dunia mereka berdasarkan hirarkinya. Hal ini tidak terlepas dari sistem kerajaan yang dianut oleh Jepang serta sejarah Jepang yang pada zaman *bakufu* memisahkan masyarakatnya berdasarkan kelas sosialnya. Pada zaman *bakufu* membagi masyarakat Jepang menjadi empat kelas sosial yang lebih dikenal dengan *shinoukoushou* (*bushi* = militer, *noumin* = petani, *kousakunin* = tukang, *shounin* = pedagang)<sup>28</sup>. Dimana kelas militer berada di atas kelas lainnya yang diikuti oleh kelas petani, tukang dan pedagang, walaupun pada kenyataannya kelas pedagang lebih makmur dibandingkan kelas petani. Pada restorasi Meiji kelas sosial yang diberlakukan sebelumnya mulai dihapuskan. Sekalipun secara hukum

---

<sup>28</sup> W.G. Beasley, *Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang*. Diterjemahkan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. XV.

dihapuskan tetapi secara kenyataan sistem ini tertanam dalam tradisi budaya Jepang. Selain kelas sosial yang merepresentasikan mengenai hirarki di Jepang, usia, jenis kelamin dan hubungan emosional yang terbagun dalam proses interaksi sosial yang lama juga merepresentasikan hirarki di Jepang.

Dalam perkembangannya hirarki di Jepang juga ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Adanya perbedaan antar kelas dalam prestasi pendidikan.<sup>29</sup> Prestasi pendidikan menentukan masa depan, dengan pendidikan yang tinggi masyarakat Jepang dapat meraih pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi. Maka untuk itu para orang tua di Jepang menginginkan anaknya untuk dapat sekolah-sekolah dan universitas yang bergengsi. Sekolahpun menyusun kurikulumnya untuk menyiapkan para siswanya untuk dapat lulus dalam ujian masuk sekolah atau universitas yang bagus. Banyak anak yang ingin belajar sangat keras untuk dapat lulus ujian untuk sebuah sekolah bergengsi dengan harapan memperoleh status sosial yang tinggi di masyarakat.<sup>30</sup> Status akan pendidikan inilah yang disebut dengan *Gakureki Shakai*. Hal ini juga memperlihatkan hirarki yang terjadi antar sekolah di Jepang berdasarkan kemampuan mereka untuk meluluskan siswa ke sekolah-sekolah atau universitas unggulan.

---

<sup>29</sup> Mori Naoto, "Education and Success: Changes in Structure and Thinking" *Social Science Japan February 2003*, Tokyo, The Information Center for Social Science Research on Japan Institute of Social Science University of Tokyo, 2003, hlm. 16.

<sup>30</sup> Ikou Amano, "The Dilemma of Japanese Education Today" *Japanese Schooling: Patterns of Socialization, Equality, and Political Control*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 1995, hlm. 121.

Setiap orang Jepang mulai mempelajari adat hirarki ditengah keluarganya.<sup>31</sup> Keluarga yang dimaksud adalah sistem keluarga luas atau yang disebut dengan *ie*<sup>32</sup>. Dalam sistem *ie*, nenek mempunyai peranan yang besar dalam mengajar dan mendidik mengenai nilai-nilai kepada cucunya dibandingkan dengan ibunya.<sup>33</sup> Sejak kecil mereka sudah diajari bagaimana dan kepada siapa saja mereka harus membungkukan badan sebagai penghormatan seseorang kepada orang lain. Selain itu kita bisa melihat seorang ibu akan memberikan nasi pertama kali kepada kepala keluarga yang kemudian diberikan yaitu anak laki-laki walaupun anak tersebut merupakan anak kedua, setelah itu anak perempuan dan yang terakhir barulah sang ibu tersebut. Urutan pelayanan yang demikian jelas menggambarkan hirarki yang dianut oleh bangsa Jepang. Dalam contoh tersebut, hirarki di Jepang sangat bergantung terhadap jenis kelamin. Walaupun kakak perempuan lebih tua tapi statusnya dalam keluarga masih berada di bawah adiknya yang berjenis kelamin pria. Apa yang dipelajari dalam keluarga kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Sehingga keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan hirarki di Jepang. Sistem hirarki dalam keluarga inilah yang dikenal sebagai sistem keluarga tradisional Jepang atau yang disebut dengan *ie*.

---

<sup>31</sup> Ruth Benedict, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni (Pola-Pola Kebudayaan Jepang)*, diterjemahkan oleh Pramudji, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 62.

<sup>32</sup> Sistem *ie* adalah bentuk keluarga Jepang yang mengacu pada sistem patrilineal. Anggota *ie* terbentuk atas orang-orang yang memiliki hubungan darah maupun yang tidak memiliki hubungan darah. Meskipun sistem *ie* menganut sistem patrilineal, tapi tidak sepenuhnya patrilineal. Oleh karena itu, sistem *ie* memiliki karakteristik khusus, yaitu garis keturunan keluarga diteruskan oleh anak kandung laki-laki, anak angkat laki-laki, atau menantu laki-laki. yang terus tinggal bersama ayah, kepala keluarga '*ie*', dan ibunya. Anak yang ditugaskan dinas keluar kota atau jauh dari tempat kelahirannya harus hidup terpisah dari rumah, akan tetapi anak laki-laki tertua biasanya tetap tinggal di rumah. Sehingga, di dalam satu rumah tinggal dua hingga tiga generasi. (Tadashi Fukutake, 1981:31; Emiko Ochiai, 1992: 58-59)

<sup>33</sup> Tadashi Fukutake, *Gendai Nihon Shakai Ron*, Tokyo, 1972, hlm.56

Dalam *ie* dikenal sebuah istilah *oyabun-kobun*. *Oyabun* berarti orang yang memiliki status orang tua (*oya*) sedangkan *kobun* berarti orang yang berstatus anak (*ko*).<sup>34</sup> Selain status yang dipegang, mereka juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang timbal balik antara sesamanya. Seorang *oyabun* mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga ataupun mendidik *kobun*. Begitu pun sebaliknya *kobun* mempunyai kewajiban untuk membantu *oyabun* kapan saja diperlukan ataupun sekedar menjaga nama baik *oyabun*. Tanggung jawab dan kewajiban ini kemudian tertuang dalam *on*, *gimu*, dan *giri*. Nilai-nilai inilah yang mempengaruhi tindakan mereka dalam berinteraksi satu sama lainnya. *On*, *gimu* dan *giri* merupakan nilai yang selalu bergandengan dalam hirarki Jepang dan berlaku timbal balik yang mengharuskan mereka bereaksi sepiantasnya terhadap satu sama lainnya.

### **2.1.3.1. Konsep *On***

Dalam hirarki Jepang terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat Jepang. Kata "kewajiban", yang mencakup utang seseorang dari yang paling besar sampai yang paling kecil, adalah *on*<sup>35</sup>. Namun utang yang dimaksud di sini lebih mengarah ke arah utang moral ataupun utang psikologis yang diterima seseorang. *On* terjadi ketika terdapat pemberi dan penerima serta ada sesuatu yang diberikan oleh si pemberi kepada penerima entah itu berupa pertolongan, pemberian, ilmu yang diajarkan ataupun berupa kemurahan hati dari pemberi *on*. Namun harus digarisbawahi bahwa antara pemberi dan penerima

---

<sup>34</sup> Chie Nakane, *Masyarakat Jepang*, diterjemahkan oleh Bambang Kussriyanto, Jakarta, Sinar Harapan, 1981, hlm. 55.

<sup>35</sup> Ruth Benedict, *op.cit.*, hlm. 105.

mempunyai sebuah hubungan emosional yang kuat. Sehingga *on* sangat sulit diberikan kepada orang yang tidak dikenal ataupun baru dikenal oleh sang pemberi. Sebagai contoh kita dapat melihat ketika ada orang Jepang yang baru datang ke Indonesia, ketika kita makan bersama di rumah makan, kita tidak akan pernah mendapati dia akan membayarkan makanan yang kita makan dan dia akan merasa tidak enak jika kita membayarkan makanannya.

Konsep *on* bersifat hirarkis dalam artian kedudukan pemberi dan penerima tidak sederajat. Pemberi tentu lebih tinggi daripada penerima walaupun status sosial antara pemberi dengan penerima sederajat. Seseorang menerima *on* dari atasannya dan tindakan menerima suatu *on* dari siapa saja yang belum tentu atasannya atau setidaknya orang setingkat, menimbulkan perasaan bahwa orang itu lebih rendah daripada si pemberi *on*.<sup>36</sup>

Ruth Benedict membagi *on* menjadi empat, yaitu: (1) *Ko on*, *on* yang diterima dari kaisar, (2) *Oya on*, *on* yang diterima dari orang tua, (3) *Nushi no on*, *on* yang diterima dari majikan atau tuan dan (4) *Shi no on*, *on* yang diterima dari guru.<sup>37</sup> Dalam pembagian ini, lebih menekankan berdasarkan dari siapa pemberi *on* tersebut dan tentu mempunyai hubungan emosional yang terbagun baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini akan khusus membahas mengenai *on* yang diterima dari guru (*shi no on*). Penerimaannya tentulah siswa yang diajar oleh guru, bentuk *on* yang diterima oleh dapat berupa ilmu yang

---

<sup>36</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hlm. 105.

<sup>37</sup> Ruth Benedict, Op. cit, hal 125.



diajarkan oleh sang guru ataupun pendidikan yang diajarkan oleh sang guru dalam memajukan kehidupan sang siswa.

Jadi sudah pasti setiap siswa di Jepang memikul *on* yang diberikan oleh gurunya. Merekapun wajib membayar kembali *on* tersebut. *On* adalah utang dan harus dibayar kembali; tetapi di Jepang, semua pembayaran kembali dianggap berada dalam kategori lain.<sup>38</sup> Misalkan seorang guru membantu siswanya untuk dapat lulus ujian dengan memberikan pelajaran tambahan, sang siswa akan terus mengingat itu dan akan membayarnya kembali walaupun hanya dengan mengirimkan kartu ucapan selamat tahun baru kepada sang guru sekalipun siswa tersebut telah lulus bertahun-tahun lamanya. Hal seperti ini sangat jarang kita temui di Indonesia. Walaupun *on* merupakan sebuah kebaikan diberikan kepada seseorang tetapi bangsa Jepang menganggap pembayaran kembali itulah yang menjadi kebaikan yang sebenarnya. Terdapat dua jenis pembayaran kembali *on* yaitu *gimu* dan *giri*.

Seseorang yang melalaikan pembayaran kembali atas *on* yang telah diterimanya disebut *on shirazu* yaitu orang yang tidak tahu balas budi. *On shirazu* merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap orang tersebut. Seseorang yang disebut *on shirazu* pada akhirnya akan dijauhi serta dikucilkan oleh masyarakat.<sup>39</sup> Hal ini juga berlaku terhadap siswa yang melakukan kekerasan terhadap gurunya, karena telah mengabaikan kebaikan sang guru dengan membalasnya dengan sebuah tindak kekerasan.

---

<sup>38</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hlm. 121.

<sup>39</sup> Harumi Befu, *Kodansha Encyclopedia of Japan VI*, Japan, Kodansha LTD, 1983, hlm. 105.

### 2.1.3.2. Konsep *Gimu* dan *Giri*

Pembayaran kembali *on* merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang karena dianggap sebagai sebuah kebajikan. Walaupun apa yang diberikan dalam konteks *on* sendiri merupakan sebuah kebaikan namun hal tersebut bukan merupakan sebuah kebajikan, pembayaran kembali *on* itulah yang merupakan sebuah kebajikan. Kebajikan ini dimulai pada saat sang penerima *on* memusatkan dirinya secara aktif untuk menembus *on* yang diterimanya.<sup>40</sup> Seperti ketika seorang siswa sekolah tingkat atas yang telah dibantu untuk dapat lulus ujian masuk perguruan tinggi oleh gurunya, kemudian ketika siswa tersebut lulus dan ia ingin membalas kebaikan gurunya maka saat itulah dinamakan sebuah kebajikan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya. Pembayaran kembali *on* terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

#### a. *Gimu*

Pembayaran-pembayaran tanpa batas atas *on* disebut *gimu* dan tentang itu mereka mengatakan, “orang tak pernah dapat membayar kembali sepersepuluh ribu dari *on* ini”.<sup>41</sup> Dalam artian masyarakat Jepang sekuat apapun, dengan cara bagaimanapun atau sampai kapanpun ia berusaha, ia tidak akan mampu untuk membayar kembali seluruh *on* yang telah diterimanya. Sehingga *gimu* tidak mempunyai syarat khusus ataupun jangka waktu yang membatasi untuk pembayaran *on* yang telah diterima.

---

<sup>40</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hal 121.

<sup>41</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hal 122.

*Gimu* sendiri berperan sebagai nilai-nilai sosial agar masyarakat Jepang dapat membangun sifat nasionalis terhadap negara dan patuh dan hormat terhadap orang tua ataupun leluhurnya. Untuk itu *gimu* pun dikelompokkan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu: (1) pembayaran *on* kepada orang tua dan nenek moyang yang disebut *ko*, dan (2) pembayaran *on* kepada kaisar, hukum, dan negara yang disebut *chu*.<sup>42</sup>

Sering dengan berkembangnya waktu, *Ko* tidak hanya berupa kewajiban terhadap nenek moyang semata. Seperti yang diungkap Bellah bahwa *ko* memiliki lima unsur yaitu hubungan antara orang-tua, majikan-bawahan, suami-istri, kakak-adik, dan teman-teman. *Ko* sebagai pembayaran *on* dapat terjadi dalam hubungan emosi yang tebagun secara baik di luar hubungan keluarga. Jika kita melihat dua unsur dari lima unsur yang diungkap oleh Bellah yaitu hubungan antara orang-tua dan majikan-bawahan dengan kata lain *gimu* merupakan pembayaran kembali *on* dalam konsep *oyabun-kobun*. Sehingga *gimu* juga dapat dikaitkan dalam hubungan antara guru dengan siswanya.

*Chu* yang merupakan kewajiban membayar kembali *on* kepada kaisar, negara, dan hukum. Pembayaran kembali ini bertujuan membangun kesetiaan terhadap kaisar serta membangun sifat nasionalis bangsa Jepang. Seperti yang terlihat dalam akhir perang dunia kedua, Jepang melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat berawak yang dikenal dengan pesawat *Kamikaze*. Para awak *kamikaze* ikhlas mengorbankan dirinya demi

---

<sup>42</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hal 125.

negara atas nama kaisar. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dari *chu* dalam sejarah Jepang.

b. *Giri*

Seseorang harus membayar kembali *giri* sebagaimana dia harus membayar kembali *gimu*, tetapi *giri* itu adalah serentetan yang berlainan warnanya.<sup>43</sup> *Giri* merupakan kewajiban yang lebih bersifat heterogen dibandingkan dengan *gimu*, mulai dari rasa berterima kasih atas *on* yang diterima dahulu sampai dengan tugas membalakan dendam. Pembayaran ini harus sesuai muatannya dengan kebaikan yang telah diterima sebelumnya dan ada mempunyai batas waktu. Salah satu contoh di kehidupan sekarang ini dapat dilihat dari kebiasaan orang Jepang setiap tanggal 14 Februari tiap tahunnya yang ikut merayakan hari valentine, perempuan akan memberikan hadiah berupa coklat kepada laki-laki yang disukainya. Sang laki-laki mempunyai kewajiban membalas pemberian itu dengan coklat yang setidaknya sama dengan apa yang diterimanya pada tanggal 14 Maret di tahun yang sama yang terkenal dengan sebutan *white day*. Sebuah kebiasaan yang diadopsi dari negeri Barat tapi kebiasaan ini pun dimodifikasi sesuai dengan budaya Jepang.

*Giri* memiliki dua pembagian yang jelas yaitu *giri* kepada dunia yang berarti kewajiban seseorang untuk membayar *on* kepada sesamanya dan *giri* kepada nama sendiri yang berarti kewajiban untuk tetap menjaga kebersihan

---

<sup>43</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hlm. 140.

nama serta reputasi seseorang dari noda fitnah.<sup>44</sup> Pembagian ini menggambarkan antara *giri* yang termasuk dalam kewajiban untuk membayarkan kembali *on* yang telah diterima sebelumnya dan kewajiban yang berada diluar pembayaran kembali *on*. *Giri* terhadap nama bukanlah berupa kewajiban untuk membayar kembali kebaikan yang telah diterima, dengan kata lain *giri* ini berada diluar lingkaran pembayaran kembali *on*. Sebagai pembayaran *on*, *giri* kepada dunia terbagi menjadi empat jenis yaitu, kewajiban terhadap tuan pelindung, kewajiban terhadap sanak keluarga, kewajiban terhadap orang-orang bukan keluarga dan kewajiban terhadap keluarga yang tidak begitu dekat.<sup>45</sup>

#### **2.1.4. Kekerasan dalam Masyarakat Jepang**

Kekerasan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *violence* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *violentus* (kekuasaan atau berkuasa) merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang<sup>46</sup>. Definisi tersebut menekankan pada dua hal, yang pertama kekerasan dapat dilakukan secara fisik maupun verbal dan yang kedua pelaku kekerasan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Selain itu istilah kekerasan juga cenderung berkonotasi agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

---

<sup>44</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hlm. 141.

<sup>45</sup> Ruth Benedict, Op.cit, hal 125.

<sup>46</sup> Adofl Berger, *Encylopedic Dictionary of Roman Law*, New Jersey, The Lawbook Exchange, 1953, hlm. 768.

Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang dengan sengaja atau secara spontanitas terhadap orang lain atau kelompok maupun komunitas yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, pembangunan yang menyimpang atau perampasan kebebasan.<sup>47</sup> Kekerasan hanya untuk melakukan penyerangan fisik, lebih jauh kekerasan dapat membuat korban mengalami gangguan psikologis bahkan merampas kebebasan korban. Untuk itu tindak kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa tipe yaitu, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan perampasan.

Secara umum tindak kekerasan di Jepang disebut dengan *bouryoku*. Dalam sekolah sebagai lembaga pendidikan juga tidak luput dari tindak kekerasan. Di Jepang tindak kekerasan yang terjadi di sekolah disebut dengan *kounai bouryoku*. Tindak kekerasan ini tergolong sebagai bentuk kenakalan remaja. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah terbagi menjadi empat yaitu *tai kyoushi bouryoku* (kekerasan terhadap guru), *seito kan bouryoku* (kekerasan di antara siswa), *tai jin bouryoku* (kekerasan interpersonal) dan *kibutsu sonkai* (pengerusakan properti).<sup>48</sup> *Seito kan bouryoku* juga disebut sebagai *ijime* yang sangat mengambil perhatian pemerintah Jepang. Secara leksikal *ijime* merupakan kata benda yang berasal dari kata *ijimeru* yang mempunyai makna mengusik, menggoda, menganiaya, dan menyakiti. *Ijime* juga dapat merupakan sebuah

---

<sup>47</sup> Etienne G Krug dkk, *The World Report on Violence and Health*, dalam *The Lancet* vol. 360 October 5, Oxford, The Lancet Publishing Group, 2002, hlm. 1084.

<sup>48</sup> National Institute for Educational Policy Research (NIER), *Bouryokukoui* (Tindak Kekerasan), [PDF], Diakses melalui <http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/1syu-kaitei/1syu-kaitei090330/1syu-kaitei.6bouryoku.pdf> pada tanggal 16 April 2013, hlm. 67

tindakan yang dilakukan secara bersama dalam sebuah kelompok siswa yang bertujuan untuk mempermalukan atau menyiksa pada siswa tertentu secara psikologi atau mental, secara verbal, atau pun secara fisik<sup>49</sup>. Dari definisi tersebut *ijime* biasanya dilakukan secara bersama dalam sebuah kelompok yang berarti pelaku dan korban berada dalam kelompok yang sama. Pelaku dan korban mempunyai hubungan antar satu sama lainnya. Yang perlu digarisbawahi korban dari *ijime* ini merupakan siswa sekolah walaupun yang menjadi pelaku adalah seorang guru sekalipun serta kekerasan ini lebih menekankan terhadap kekerasan secara metal dan psikologi. Maka tak jarang korban melakukan tindak bunuh diri.

Sedangkan untuk kekerasan terhadap guru lebih menggunakan istilah *bouryoku* yaitu *tai kyoushi bouryoku* yang artinya kekerasan terhadap guru. Kekerasan terhadap guru tidak hanya sebatas kepada guru saja, kekerasan ini juga dapat berlaku terhadap pengawas sekolah dan para pengawai sekolah.<sup>50</sup> Sedangkan untuk pelaku sendiri yaitu siswa dari sekolah tersebut. Baik dilakukan secara kelompok maupun individu.

Secara khusus kekerasan terhadap guru mulai menyeruak pada akhir 1970-an dan awal 1980an. Media melaporkan kekerasan terhadap guru dan penghancuran fasilitas sekolah serta kenakalan siswa di sekolah yang merupakan penyimpangan sosial pada masa itu.<sup>51</sup> Hal itu tentu masih belangsung sampai sekarang walupun skalanya tidak terlalu besar dibandingkan di awal-awal menyeruaknya

---

<sup>49</sup> Yoshio Sugimoto, *An Introduction to Japanese Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, hlm. 137.

<sup>50</sup> Board of Education Prefecture Nara, *Collection of Case Guidance to Phenomenon of Violence Act in Middle School*, Nara, Board of Education Prefecture Nara, 2012, hlm. 2.

<sup>51</sup> Hiroshi Ishida dan Satoshi Miwa, *Delinquency, school Environment, adn Academic Achievement in Japan*, Tokyo, Institute of Social Sciences, 2001, hlm. 4.

penyimpangan tersebut. Sekolah dan gurupun diindikasikan sebagai penyebab dari kenakalan siswa tersebut. Ada keyakinan luas bahwa pendidikan dan bimbingan ditawarkan oleh guru-guru di sekolah yang tidak memadai dan menyebabkan kenakalan tersebut.<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Jepang kemudian bergerak cepat dalam usaha mengatasi hal tersebut dengan memberlakukan peraturan baru yang komprehensif dan totaliter yang diberlakukan khususnya di sekolah tingkat menengah. Seperti seragam sekolah yang harus digunakan ketika datang sekolah maupun setelah berada di luar sekolah. Walaupun peraturan ini masih berlaku sampai sekarang tetapi menurut survei yang dilakukan Departemen Pendidikan Jepang, 6% sekolah dasar, 37% sekolah menengah dan 54% sekolah tinggi masih mengalami perilaku kekerasan di sekolah. Perilaku kekerasan ini mencakup tindakan *ijime* dan kekerasan terhadap guru.<sup>53</sup>

#### 2.1.5. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai kekerasan terhadap guru sebelumnya dilakukan oleh Hiroshi Ishida dan Satoshi Miwa dengan judul *Delinquency, School Environment and Academic Achievement in Japan*. Penelitian ini membahas mengenai kenakalan remaja di sekolah yang menyebabkan beberapa penyimpangan sosial salah satunya yaitu mengenai kekerasan terhadap guru. Serta dampak kenakalan remaja terhadap sekolah. Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan lebih

---

<sup>52</sup> Ibid., hal 4.

<sup>53</sup> Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, *Heisei 19 Nendo Jido Seito no Mondai Kodo nado Seito Sidojyo no Shomondai nikansuru Chosa (2007 Survey on Problem Behaviors Associated with Guidance of Pupils and Students)*. Tokyo, Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, 2008.



menghususkan terhadap kekerasan yang terjadi terhadap guru oleh para siswa guna mendapatkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial tersebut.

Penelitian yang relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Adriani dengan judul *Analisis Tindak Shuudan Ijime dalam Drama Nobuta Wo Produce*. Penelitian ini lebih menghususkan terhadap kekerasan yang terjadi dikalangan siswa yang dilakukan secara berkelompok. Walaupun penelitian ini tidak membahas mengenai kekerasan yang terjadi terhadap guru di Jepang namun secara tidak langsung penelitian ini memberi gambaran mengenai kekerasan yang terjadi di sekolah dan peranan guru dalam terjadi kekerasan yang terjadi di kalangan siswa.

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu *Kebijakan Evaluasi Guru di Jepang* oleh Murni Ramli. Penelitian ini mengarah kepada kebijakan evaluasi guru di Jepang yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Jepang (MEXT) akibat ketidakmampuan guru dalam mengantisipasi cepatnya perkembangan masyarakat Jepang dan dunia sehingga menurunnya kualitas pendidikan Jepang. Kondisi ini juga diperburuk meningkatnya kasus kriminal di sekolah seperti *ijime*, perusakan fasilitas sekolah, maupun tindak kekerasan terhadap guru.

#### **2.1.6. Kerangka Konseptual**

Penulisan kerangka penelitian ini berasal dari kesimpulan penulis atas pokok permasalahan dengan menghubungkan tiap nilai yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap guru oleh siswa di Jepang. Kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual

